



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Mangantar Tua Silalahi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah  
Sumatera Utara

Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP. 196812301996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**  
**DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                             | Target |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                      | (3)                                                                                                    | (4)    |
| 1   | Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum | 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum | 100 %  |

| Kegiatan                                                                   | Anggaran                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                          | <b>Rp 60.738.172.000,-</b> |
| Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum | Rp 60.738.172.000,-        |

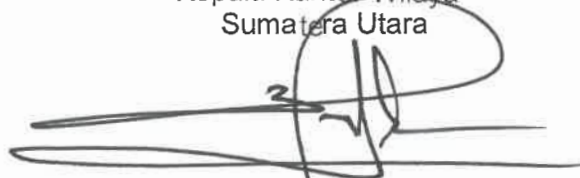
Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah  
Sumatera Utara



Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP. 196812301996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Mangantar Tua Silalahi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah  
Sumatera Utara

Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP. 196812301996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen  
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen  
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP. 196812301996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**  
**DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                  | Target    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                                     | (3)                                                                                                                                         | (4)       |
| 1.  | Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah | 1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan                                                                                 | 1 Dokumen |
|     |                                                                                                         | 2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah                                                                                           | 1 Dokumen |
| 2.  | Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah                                                    | Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah                                                              | 25 %      |
| 3.  | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah                                                           | 1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi                        | 82 %      |
|     |                                                                                                         | 2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi                | 80 %      |
| 4.  | Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah                                                                | Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah | 70 %      |

| Kegiatan                                                                                | Anggaran                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Program Pembentukan Regulasi</b>                                                     | <b>Rp 141.516.000,-</b>   |
| Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah | Rp 141.516.000,-          |
| <b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>                                            | <b>Rp 4.064.777.000,-</b> |
| Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah                                              | Rp 4.064.777.000,-        |

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Min Usihen  
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara



Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP. 196812301996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Mangantar Tua Silalahi

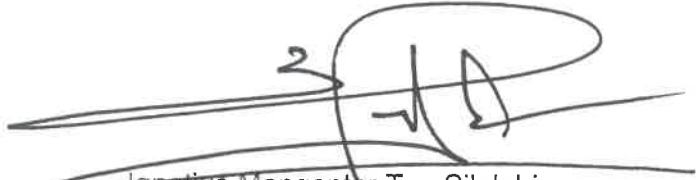
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

  
Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP. 196812301996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Mangatar Tua Silalahi  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady  
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indrady  
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Ignatius Mangatar Tua Silalahi  
NIP. 196812301996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**  
**DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM**

| No. | Sasaran Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja Kegiatan                                                      | Target |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                     | (3)                                                                             | (4)    |
| 1.  | Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah | Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti | 80 %   |

| Kegiatan                                     | Anggaran                |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>            | <b>Rp 455.196.000,-</b> |
| Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah | Rp 455.196.000,-        |

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady  
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara



Ignatius Mangalar Tua Silalahi  
NIP. 196812301996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Mangatar Tua Silalahi  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Ignatius Mangatar Tua Silalahi  
NIP. 196812301996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ignatius Mangantar Tua Silalahi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP 196812301996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**  
**DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                              | Target |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                     | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah                                                             | Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah                                                                                                | 6%     |
| 2.  | Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah | Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan | 90%    |
| 3.  | Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan                                                   | Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan                                                                                 | 90%    |
| 4.  | Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup BHP                                                                 | Persentase pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkup BHP                                                                                                   | 100%   |
|     |                                                                                                            | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                 | 3,1    |

| Kegiatan                                                    | Anggaran                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>                | <b>Rp 5.896.188.000,-</b> |
| Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil) | Rp 3.832.429.000,-        |
| Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)    | Rp 2.063.759.000,-        |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                           | <b>Rp 9.759.668.000,-</b> |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP                   | Rp 9.759.668.000,-        |

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara



Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP 196812301996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ignatius Mangantar Tua Silalahi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP 196812301996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Mangantar Tua Silalahi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu  
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah  
Sumatera Utara

Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP 196812301996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**  
**DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

| No. | Sasaran Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Kegiatan                                                   | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                        | (3)                                                                          | (4)    |
| 1.  | Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah                | 1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah | 30%    |
| 2   | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah | 1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah       | 70%    |
|     |                                                                            | 2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah         | 20%    |

| Kegiatan                                               | Anggaran                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>           | <b>Rp 2,532,165,000,-</b> |
| Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | Rp 2,532,165,000,-        |

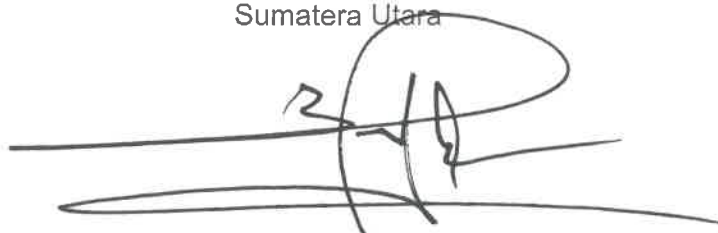
Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu  
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah  
Sumatera Utara



Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP 196812301996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Mangantar Tua Silalahi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah  
Sumatera Utara

Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP 196812301996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra  
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra  
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP. 196812301996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA UTARA DENGAN DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

| No. | Sasaran Kegiatan                                              | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                          | Target   |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1) | (2)                                                           | (3)                                                                                                 | (4)      |
| 1.  | Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah             | Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum | 80 %     |
| 2.  | Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan                | 29 Orang |

| Kegiatan                                                   | Anggaran                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Program Pembentukan Regulasi</b>                        | <b>Rp 550.000.000,-</b> |
| Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah | Rp 550.000.000,-        |

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra  
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP. 196812301996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP. 196812301996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafriadi Lubis  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Pihak Pertama,  
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP 196812301996031001

Syafriadi Lubis  
NIP 198205112005011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                          | Target |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                      | (3)                                                                                                 | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum | 100 %  |

| Kegiatan                                                                   | Anggaran                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                          | <b>Rp. 60.738.172.000,-</b> |
| Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum | Rp. 60.738.172.000,-        |

Medan, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,  
 Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Pihak Pertama,  
 Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum  
 Kantor Wilayah Sumatera Utara

Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
 NIP. 196812301996031001

Syafriadi Lubis  
 NIP. 198205112005011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafriadi Lubis

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 23 Januari 2025

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

Syafriadi Lubis

NIP 198205112005011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferry Ferdiansyah  
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

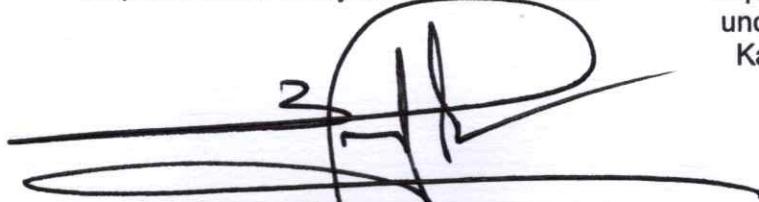
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

  
Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP 196812301996031001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Peraturan Perundang-  
undangan dan Pembinaan Hukum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

  
Ferry Ferdiansyah  
NIP 198002172001121001

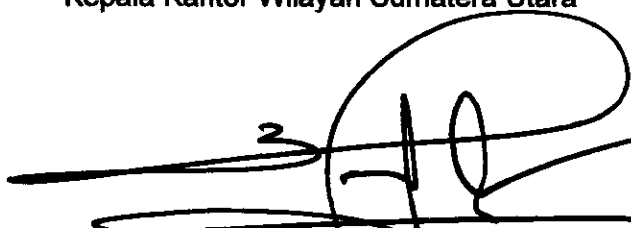
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**  
**DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                                | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                                                                                           | <b>Target</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                                                             | <b>(3)</b>                                                                                                                                  | <b>(4)</b>    |
| 1.         | Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah                                                      | Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum                                         | 80%           |
| 2.         | Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan                                          | Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan                                                        | 29 Orang      |
| 3.         | Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah | 1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan                                                                                 | 1 Dokumen     |
|            |                                                                                                        | 2. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah                                                                                            | 1 Dokumen     |
| 4.         | Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah                                                   | Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah                                                              | 25%           |
| 5.         | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah                                                          | 1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi                        | 82%           |
|            |                                                                                                        | 2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi                | 80%           |
| 6.         | Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah                                                               | Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah | 70%           |
| 7.         | Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah                                | Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti                                                             | 80%           |

| Kegiatan                                                                               | Anggaran                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Program Pembentukan Regulasi</b>                                                    | <b>Rp. 691.516.000,-</b>   |
| Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah                              | Rp. 550.000.000,-          |
| Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah | Rp. 141.516.000,-          |
| <b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>                                           | <b>Rp. 4.064.777.000,-</b> |
| Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah                                             | Rp. 4.064.777.000,-        |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                      | <b>Rp. 455.196.000,-</b>   |
| Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah                                           | Rp. 455.196.000,-          |

Medan, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara



Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP 196812301996031001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara



Ferry Ferdiansyah  
NIP 198002172001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferry Ferdiansyah

Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 23 Januari 2025

Kepala Divisi Peraturan Perundang-  
undangan dan Pembinaan Hukum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

Ferry Ferdiansyah  
NIP 198002172001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sahata Marlen Situngkir  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

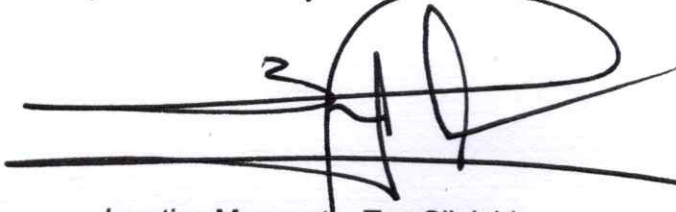
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

  
Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP 196812301996031001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

  
Sahata Marlen Situngkir  
NIP 197106221992031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

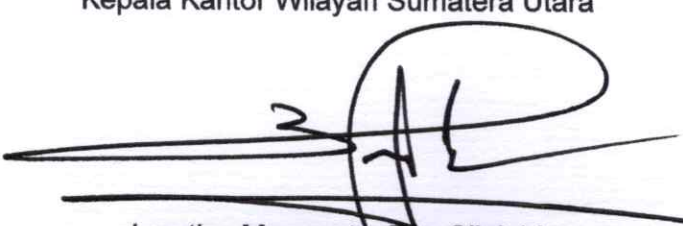
| No. | Sasaran Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                              | Target |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                     | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah                                                            | Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah                                                                                               | 6%     |
| 2.  | Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah | Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan | 90%    |
| 3.  | Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah                                                | Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah                                                                               | 30%    |
| 4.  | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah                                 | 1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah                                                                                  | 70%    |
|     |                                                                                                            | 2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah                                                                                    | 20%    |

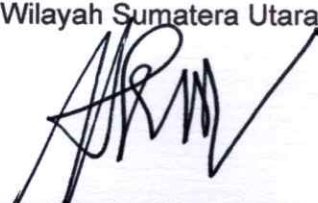
| Kegiatan                                               | Anggaran                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>           | <b>Rp. 6.364.594.000,-</b> |
| Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah     | Rp. 3.832.429.000,-        |
| Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | Rp. 2.532.165.000,-        |

Medan, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

  
Ignatius Mangantar Tua Silalahi  
NIP 196812301996031001

  
Sahata Marlen Situngkir  
NIP 197106221992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sahata Marlen Situngkir

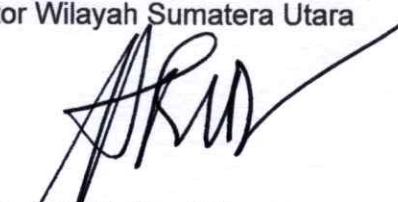
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 23 Januari 2025

Kepala Divisi Pelayanan Hukum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

  
Sahata Marlen Situngkir  
NIP 197106221992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surya Dharma  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sahata Marlen Situngkir  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

Sahata Marlen Situngkir  
NIP 197106221992031002

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

Surya Dharma  
NIP 198402282006041001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
**DENGAN KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

| No. | Klasifikasi Rincian Output (KRO)             | Rincian Output (RO)                                           | Indikator Rincian Output                                                             | Target     |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2)                                          | (3)                                                           | (4)                                                                                  | (5)        |
| 1.  | 7110.BAH.Pelayanan Publik Lainnya            | 001. Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah               | Jumlah Layanan AHU yang diselenggarakan di wilayah                                   | 4 Layanan  |
|     |                                              | 002. Layanan Balai Harta Peninggalan                          | Jumlah layanan yang diselenggarakan oleh Balai Harta Peninggalan                     | 5 Layanan  |
|     |                                              | 003. Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah           | Jumlah dokumen Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah                        | 1 Dokumen  |
| 2.  | 7110.BCB.Perkara Hukum Lembaga               | 001. Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah | Jumlah perkara terkait produk Layanan AHU di wilayah yang ditangani /ditindaklanjuti | 1 Perkara  |
| 3.  | 7110.BIC.Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | 001. Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah | Jumlah lembaga yang menerima dan/atau melakukan pengawasan kenotariatan di wilayah   | 13 Lembaga |

| Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output                | Anggaran                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>       | <b>Rp. 3.832.429.000,-</b> |
| Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah | Rp. 3.832.429.000,-        |
| 7110.BAH.Pelayanan Publik Lainnya                  | Rp. 2.349.841.000,-        |
| 7110.BCB.Perkara Hukum Lembaga                     | Rp. 23.080.000,-           |
| 7110.BIC.Pengawasan dan Pengendalian Lembaga       | Rp. 1.459.508.000,-        |

Medan, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

Sahaja Marlen Situngkir  
NIP 197106221992031002

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

Surya Dharma  
NIP 198402282006041001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surya Dharma

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 23 Januari 2025

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

Surya Dharma  
NIP 198402282006041001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Berkat Elhan Harefa  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sahata Marlen Situngkir  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

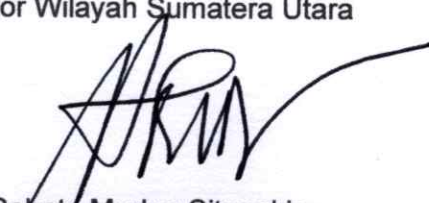
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

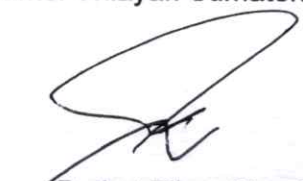
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

  
Sahata Marlen Situngkir  
NIP 197106221992031002

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

  
Berkat Elhan Harefa  
NIP 198504112010011026

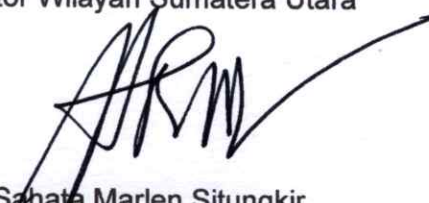
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**DENGAN KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

| No. | Klasifikasi Rincian Output (KRO)              | Rincian Output (RO)                                                     | Indikator Rincian Output                                                                                           | Target    |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                           | (3)                                                                     | (4)                                                                                                                | (5)       |
| 1.  | 7121.BDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | 001. Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Informasi Kekayaan Intelektual Melalui Kegiatan Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah | 495 Orang |
|     |                                               | 002. Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah    | Jumlah orang yang mendapatkan pendampingan layanan kekayaan intelektual di wilayah                                 | 130 Orang |
|     |                                               | 003. Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah               | 150 Orang |
| 2.  | 7121.BKB.Pemantauan produk                    | 001. Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah | Jumlah perkara terkait produk Layanan AHU di wilayah yang ditangani /ditindaklanjuti                               | 2 Layanan |

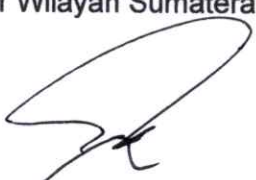
| Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output                    | Anggaran                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>           | <b>Rp. 2.532.165.000,-</b> |
| Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | Rp. 2.532.165.000,-        |
| 7121.BDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat          | Rp. 2.301.246.000,-        |
| 7121.BKB. Pemantauan produk                            | Rp. 230.919.000,-          |

Medan, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

  
Sahata Marlen Situngkir  
NIP 197106221992031002

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

  
Berkat Elhan Harefa  
NIP 198504112010011026



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Berkat Elhan Harefa  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 23 Januari 2025

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual  
Kantor Wilayah Sumatera Utara

Berkat Elhan Harefa  
NIP 198504112010011026